

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Pajak Kendaraan Bermotor Daerah Provinsi Sumatera Barat Pandemi COVID-19 berdampak serius pada beberapa industri di Indonesia. Selain bidang kesehatan yang berdampak sangat besar, aspek sosial dan ekonomi juga ikut terpukul. Pendapatan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk pemerintah provinsi Sumbar, menurun akibat berbagai pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Menariknya, Pemprov Sumbar masih mampu menghimpun pajak daerah jauh lebih tinggi dari target tahun lalu, meski pendapatannya menurun. Di masa pandemi Covid-19, Pemprov Sumbar menerapkan sejumlah strategi optimalisasi penerimaan pajak. Dengan menggunakan insentif, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Tunjangan Harta Benda Bebas (BBNKB) menjadi gratis. Kedua insentif ini berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah di masa pandemi sekaligus mengurangi beban keuangan masyarakat. Pemerintah baru-baru ini mengadopsi HKPD atau Undang-Undang Hubungan Fiskal Pemerintah Nasional dengan harapan pengaturan baru ini akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Peraturan mengizinkan negara bagian untuk mengenakan pajak baru, seperti pajak peralatan utama, dan inilah alasannya. Sebelum Covid 19, Pemprov Sumbar tidak memberikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembebasan Pajak Barang Milikan Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Akibat pandemi Covid-19, pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan. Pemerintah telah merespon secara sigap dalam bentuk kebijakan untuk memitigasi dampak penyebaran Covid 19 yang semakin meluas.

Karena hal ini akan berdampak pada kerugian yang ditimbulkan akibat dampak pandemi Covid 19 yang akan dirasakan hampir di setiap sektor ekonomi negara, dengan segala konsekuensinya. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota melakukan berbagai cara dan teknik penyelamatan kesehatan dengan merevitalisasi sektor ekonomi, melalui alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan upaya pemulihan ekonomi para pengusaha agar para pengusaha dan masyarakat pada umumnya pulih . Terdampak dari Covid 19, hal ini akhirnya menghasilkan suatu tatanan pemerintah menggantikan UU No 1 Tahun 2020 sebagai landasan hukum dan menjadi UU Pandemi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memutuskan untuk menambahkan judul proposal magang yaitu: “PROSES DAN LANGKAH PELAKSANAAN PAJAK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PANDEMI COVID-19”. Dokumen ini menjelaskan dampak pandemi Covid-19 terhadap proses dan tahapan pelaksanaan kewajiban pajak daerah di salah satu otoritas daerah di Indonesia yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Topik yang dibahas dalam laporan ini adalah:

1. Apa saja perubahan dan pembatasan proses dan tahapan pelaksanaan tugas di bidang fiskus daerah Provinsi Sumatera Barat selama pandemi Covid-19?
2. Bagaimana proses dan tahapan pelaksanaan tugas di daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat selama pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan magang

A. Tujuan Umum

Tujuan yang ingin saya capai dengan magang ini adalah:

1. Memberikan hasil akademik sesuai dengan gelarnya Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Memberikan gambaran tentang perkembangan penulis Kerjakan tugas akhir sebagai bahan ujian Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

B. Tujuan Khusus

1. Bagaimana proses dan tahapan penerapan Adat Daerah Provinsi Sumbar di Masa Pandemi Covid-19?
2. Apa saja perubahan dan kendala yang dihadapi selama proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan penerimaan pajak daerah provinsi Sumbar selama pandemi COVID-19?

1.4 Manfaat Magang

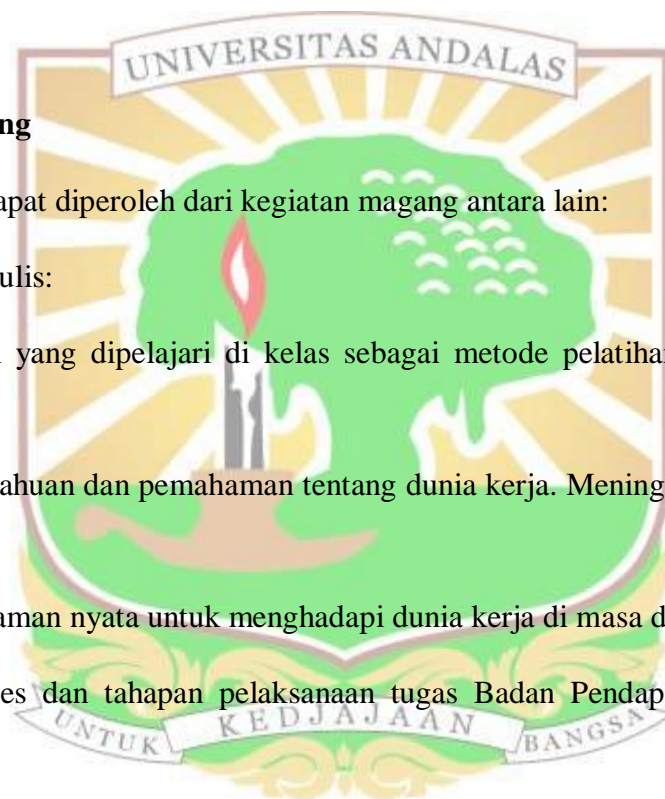
Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang antara lain:

A. Kepada para penulis:

1. Menerapkan teori yang dipelajari di kelas sebagai metode pelatihan untuk praktik kerja praktek.
2. Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang dunia kerja. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan.
3. Dapatkan pengalaman nyata untuk menghadapi dunia kerja di masa depan.
4. Memahami proses dan tahapan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk Instansi Pemerintah (Kantor Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat).

1. Kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah dapat ditingkatkan dan diperkuat.
2. Adanya pendidikan dapat mengakselerasi dan mengakselerasi kerja Kanwil DJP Sumbar.
3. Sebagai bentuk partisipasi Kanwil DJP Provinsi Sumbar untuk membantu mahasiswa memahami proses dan tindakan yang dilakukan petugas pajak di kota Padang.



Untuk Universitas Andalas:

1. Meningkatkan dan mempererat kerjasama yang baik antara Universitas Andal dengan lembaga-lembaga publik khususnya lembaga keuangan daerah di kota Padang.
2. Mahasiswa dapat memenuhi kewajiban profesinya sesuai ketentuan, sehingga calon yang memiliki pengalaman kerja dan mampu bersaing di dunia kerja dapat ditraining di tempat.
3. Setelah praktek di Universitas Andala, Anda bisa mendapatkan mahasiswa magister dengan pengetahuan yang luas, pengalaman kerja praktek dan pengalaman di berbagai bidang.
4. Menciptakan basis bukti bagi calon penerus negara dalam pemerintahan dengan lingkungan kerja yang nyata.
5. Untuk mendorong pertumbuhan lulusan di masa depan.
6. Potensi sumber daya untuk mempromosikan Universitas.

1.5 sistem penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memberikan konteks untuk argumen penulis, formulasi Soal, tujuan latihan, manfaat latihan, sistematika penulisan.

BAB 2 LATAR BELAKANG TEORITIS

Bab ini menjelaskan pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pengertian pajak daerah, pengertian proses dan tahapan pemungutan pajak

BAB 3 TENTANG LEMBAGA PEMERINTAH

Bab ini memberikan gambaran tentang kantor pelayanan pajak daerah, termasuk sejarah, visi dan misi, tanggung jawab utama, fungsi dan struktur organisasi kantor pelayanan pajak nasional.

BAB 4 ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengkaji proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan pajak daerah, serta perubahan dan pembatasan yang terjadi selama proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Lingkup wilayah.



BAB 5 PENUTUP

Bab ini adalah bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan. Jawaban atas pertanyaan digunakan untuk menarik kesimpulan. Rekomendasi yang relevan berdasarkan pengamatan juga disertakan dalam bab ini.

